



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 21 April 2021

Halaman: 2

Desentralisasi,

BST Dikelola Dinsoskertrans

JOGJA, Radar Jogja - Bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber dari APBD Kota Jogja tahun 2021 bagi warga miskin terdampak Covid-19 dipastikan cair. Hanya, pencairannya masih menunggu proses administratif maupun penyesuaian regulasi.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kota Jogja, Maryustion Tonang mengatakan, saat ini program bantuan sosial (bansos) yang jalan masih bersumber dari APBN atau pemerintah pusat. Bansos dari pemkot juga dipastikan akan menyusul. "BST APBD ya pasti ada, tinggal waktunya aja. Kami tinggal siapkan administrasi termasuk mengenai perwal (Peraturan Wali Kota) nya juga," katanya.

Tion sapaannya itu menjelaskan besaran

BST APBD tahun 2021 itu sama nilainya dengan bantuan sosial dari pusat yaitu sebesar Rp 1,2 juta per penerima. Dan rencananya akan diterima sekaligus dalam jangka waktu satu atau dua kali. Sehingga, setiap penyaluran calon penerima manfaat akan menerima sebesar Rp 600 ribu atau bisa sekaligus Rp 1,2 juta. "Nanti rencana satu atau dua kali saja (penyalurannya)," ujarnya.

Pun dalam pengelolaan anggaran bansos tahun ini ada pergeseran. Tahun lalu dalam pengelolaannya dilakukan secara terdesentralisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja. Namun, tahun ini berubah jadi desentralisasi ke masing-masing OPD. Maka sudah sepenuhnya pengelolaan anggarannya dilakukan oleh Dinsoskertrans. "Ini sedang kami diskusikan, administrasi terpenuhi.

Prinsipnya (penyalurannya, Red) jangan sampai tidak sesuai dengan regulasi, makanya harus ada regulasi baru," jelasnya.

Sementara sasaran BST merupakan peserta Keluarga Sasaran Perlindungan Jaminan Sosial (KSJPS) yang belum mendapat alokasi BST dari pemerintah pusat. Ada sekitar 3.080 orang. "Rumusnya yang masuk KSJPS tapi tidak mendapat BST dari APBN," tambahnya.

Terpisah, Anggota Komisi D, DPRD Kota Jogja, Antonius Suhartono mengatakan kendati belum bisa dicairkan, diharapkan agar ada percepatan. Pasalnya, bantuan tersebut sangat diharapkan oleh para calon penerima. "Bantuan tersebut sudah dinantikan oleh warga untuk membantu pemulihan perekonomian di masa pandemi," katanya.

Peruntukan bantuan itu pun diserahkan sepenuhnya oleh penerima. Kendati tidak ada ketentuan khusus, namun seyogyanya bisa digunakan untuk menopang kebutuhan primer.

Anton menambahkan, selain bantuan yang sudah menjadi hak penerima, Pemkot juga perlu memperkuat program pemberdayaan. Pandemi Covid-19 diakibatkan telah memukul hampir semua sektor kehidupan. Tidak sedikit warga yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan. "Warga yang terdampak pandemi seharusnya menjadi prioritas untuk pemberdayaan. Mereka yang di PHK kemudian akan berwirausaha, bisa dijembatani mengikuti pelatihan atau akses kredit modal," tambahnya. (wia/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat Sah

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005